

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih merupakan Negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian meliputi jutaan usaha tani yang kecil-kecil yang masing-masing adalah manusia-manusia yang perilaku ekonominya sangat berbeda-beda. Para petani kecil inilah pelaksana produksi yang sebenarnya. Benar bahwa mereka akan senang kalau produksinya dapat naik dan mereka selalu akan berusaha menaikkan produksi tidaklah yang paling penting bagi petani.

Yang lebih penting lagi adalah naiknya pendapatan yaitu hasil produksi dikalikan harga penjualan di pasar. Indonesia adalah negara yang sangat luas, tidak saja keadaan fisik daerah yang satu berbeda dengan keadaan daerah yang lain tetapi bahkan juga sifat-sifat dan kebiasaan cara berfikirnya. Untuk menjamin keberhasilan setiap perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah. Daerah yang potensi pembangunannya besar akan segera nampak dari respon yang diberikan pada program-program pembangunan nasional. Potensi-potensi ini tidak hanya terdiri atas sumber alam dan sumber-sumber fisik, tetapi tidak kurang

dimilikinya. Peranan faktor manusia sangat penting karena hanya oleh manusia sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah dapat digali dan digerakkan dalam pembangunan.<sup>1</sup>

Proses pembangunan di Indonesia sejak awal telah difokuskan pada pergeseran aktivitas ekonomi dari semua semula terkonsentrasi pada sektor pertanian atau jasa, yang kemudian lebih dikenal dengan strategi industrialisasi. Dalam waktu relatif cepat, proses industrialisasi segera menampakkan hasil yang cukup mengembirakan, seperti ekspansi investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita, dan kesempatan kerja yang bervariasi.

Meskipun begitu, kondisi tersebut bukan berarti meniadakan peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, karena dalam beberapa hal terlihat kontribusi yang diberikan masih cukup besar. Dengan gambaran tersebut bisa dilihat bahwa seiring dengan semakin majunya proses industrialisasi, di Indonesia ternyata sektor pertanian masih ditempatkan dalam posisi cukup penting. Menjadi lebih penting lagi karena pertumbuhan sektor industri yang pesat ternyata tidak secara langsung diikuti oleh penyerapan tenaga kerja dengan porsi yang seimbang. Akhirnya, di satu sisi pertumbuhan dinikmati oleh sektor industri<sup>2</sup>.

Pemamfaatan sumberdaya alam harus sinergis dengan pembangunan daerah dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini dapat

---

<sup>1</sup> Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. PT pustaka LP3ES. Jakarta, 1995. Hal 261

<sup>2</sup> Erani Yustika Ahmad, *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia dan*

di wujudkan melalui *networking/kerjasama* yang sangat sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan Perguruan Tinggi”<sup>3</sup>.

Pembangunan sistem pertanian merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dengan industri dan jasa, di bidang pengairan diarahkan pada usaha pengembangan, pemamfaatan air dari sumber-sumber dengan perencanaan teknis yang teratur dan serasi untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perkehidupan, menunjang perekonomian daerah yang efektif dan kuat, serta meningkatkan taraf hidup petani itu sendiri <sup>4</sup>.

Pembangunan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan taraf hidup petani dan kualitas kehidupan melalui peningkatan diversifikasi produk pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, gizi serta keperluan ekspor. Pola pengembangannya melalui pola pertanian inti rakyat dengan penerapan teknologi maju, teknologi tepat guna. Disini peran pemerintah sangat dibutuhkan, misal pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang tidak memberatkan petani dengan tetap menyelenggarakan kredit dengan bunga rendah untuk modal petani, mengadakan program pupuk murah yang didistribusikan lewat KUD. Semua itu guna menciptakan struktur pertanian nasional yang handal dan kuat guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga dimasa mendatang kita tidak perlu lagi impor pangan, bahkan produksi pangan nasional bisa diekspor.

---

<sup>3</sup> Asnawi, S. 1991, *Industrialisasi dan Pertanian Serta Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, Konggres Ilmu Pengetahuan Nasional V, 3-7 September 1991, Jakarta Pusat Analisa Perkembangan IPTEK-LIPI Jakarta.

pengembangan pembangunan, terutama sektor pertanian pangan dan diimbangi peran aktif masyarakat setempat untuk membangun sektor pertaniannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat peneliti sampaikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri tahun 2004-2006 ?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Peran dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri?

## **C. Kerangka Teori**

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau defenisi tertentu, sehingga akan tampak jelas sistematis dan ilmiah dalam melakukan penelitian<sup>6</sup>. Maka dari itu dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai unsur yang penting adalah teori, karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

Menurut Kerlinger, F.N, dalam bukunya *Foundation of Behavioral research*

*“Teori merupakan suatu rangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara mereumuskan hubungan antar konsep”<sup>7</sup>.*

Sedangkan Koentjaraningrat berpendapat bahwa teori adalah,

*”Merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”<sup>8</sup>.*

Dari definisi tersebut diatas, teori mengandung 3 hal :

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan.
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Menurut Chester I. Barnard mengemukakan bahwa : “ Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih” (*I define organization as a system of cooperatives of two more persons*)<sup>9</sup>.

Dari pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki tiga unsur dasar, yaitu :

1. Orang-orang (sekumpulan orang).
2. Kerjasama.
3. Tujuan yang ingin dicapai.

<sup>7</sup> Jimmi Mohammad Ibrahim, “*Prospek otonomi Daerah*”. Dahara prize, 1999. hal 33.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1990 Hal. 87.

<sup>9</sup> Chester I. Barnard) “*The Executive Functions*” 1938.

Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.

Goal organisasi mempunyai makna yang berbeda menurut teori strategi rasional dan teori emergent strategy yaitu:<sup>10</sup>

1. Dalam teori strategi rasional goal organisasi di sebut dengan official goal. Yang mana official goal bersifat kaku dan general.
2. Dalam teori emergent strategy di kenal sebagai operational goal yang bersifat spesifik dan operasional. Bagi emergent strategy, goal organisasi tidak fix dan selalu berubah karena dorongan dari dalam maupun dari luar.

Bila dikaitkan dengan teori diatas maka Dinas pertanian kabupaten Wonogiri mempunyai official goal yaitu mengembangkan dan meningkatkan mutu sektor pertanian yang meliputi, bidang pangan, perkebunan dan ketahanan pangan seperti yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam operasional goal dalam melaksanakan tujuan utamanya yang dituangkan dalam program-program dan kegiatan, dapat berubah-ubah karena dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh berbagai faktor.

Wilson dalam bukunya *What Government Agencies Do and What They Do it*, membedakan empat jenis instansi, yaitu organisasi produksi, organisasi prosedural, organisasi Craft dan organisasi coping. Dari empat jenis organisasi yang digolongkan wilson, maka dinas pertanian Kabupaten wonogiri dapat di golongkan pada organisasi craft. Yang mana organisasi craf

menjalankan tugas-tugas yang rutin yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam organisasi ini, outcome dapat diukur dengan jelas.

### 1. Pemerintah daerah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Karena itu pasal 18 undang-undang dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah dan kecil, dengan bentuk dan susunan daerahnya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan, "oleh karena negara Indonesia itu suatu *cenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en lokale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah,

tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang disebut "Undang-undang tentang pemerintah daerah" karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada Otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini



dasrkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi.

Pada era reformasi dan Otonomi Daerah terjadi perubahan yang mendasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebelumnya, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan cenderung bersifat sentralistik, terpola secara seragam dari pusat kedaerah. Daerah diberikan keleluasaan dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing pada tingkat nasional saat

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2001 sesuai dengan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Program pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 22 Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang ditetapkan oleh presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Propenas memuat uraian kebijakan Nasional secara rinci dan terukur. Pelaksanaannya di tingkat Nasional dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Tinggi Negara. Departemen dan Lembaga non Departemen, sedangkan di daerah tertuang dalam program Pembangunan Daerah (Propeda)<sup>11</sup>.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; untuk mendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas daerah. Dalam Kitap Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 124 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas daerah berkedudukan sebagai :

- a. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah.

- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- c. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 ) tugas pokok dan fungsi Dinas pertanian Kabupaten Wonogiri adalah: Menyelenggarakan kewenangan pemerintah Daerah dalam bidang pertanian meliputi urusan pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan bimas ketahanan pangan. Dinas pertanian Kabupaten Wonogiri terdiri dari Sub Dinas :

- a. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan membawahi :

- 1) Seksi Produksi Holtikultura.
- 2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan.
- 3) Seksi Rehabilitasi Pengembanangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.
- 4) Seksi Produksi Padi dan Palawija.

- b. Sub Dinas Perkebunan membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan Perkebunan.

- 3) Seksi Produksi Perkebunan.
  - 4) Seksi Usaha Tani Perkebunan.
- c. Sub Dinas Bimas Ketahanan Pangan membawahi :
- 1) Seksi Pelayanan Intensifikasi
  - 2) Seksi Pengkajian Ketersediaan Pangan dan Distribusi.
  - 3) Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi.
  - 4) Seksi Agribisnis.

## 2. Peranan

Menurut Koentjaraningrat :

*"Peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu<sup>12</sup>.*

Sedangkan Soerjono soekamto bahwa peranan (role) adalah:

*"Peranan adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan<sup>13</sup>.*

Mengutip pendapat Levison, bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu :

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi". Bumi Aksara, Jakarta. 1989. hal. 169.

menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Memperhatikan kecendrungan diatas, adalah sangat relefan untuk membicarakan Posisi dan peranan dinas pertanian terutama sebagai fasilitator, dinamisator dan koordinator, terutama dalam konteks pertanian.

Peran Dinas pertanian sebagai fasilitator adalah memfasilitasi pengadaan pupuk, bibit, saproda serta sarana dan prasarana kebutuhan petani, guna pencapaian pembangunan pertanian yang menguntungkan semua pihak.

Peran Dinas pertanian sebagai Dinamisator adalah bagaimana Dinas pertanian bisa dinamis dalam Inovasi Tegnologi pertanian misal Teknologi pengolahan dan pemasaran produksi guna kelancaran perputaran roda pertanian yang mensejahterakan petani.

Peran Dinas Pertanian sebagai Koordinator adalah mengkoodinir sumber-sumber pertanian, semisal Koordinasi antar pasar, pematokan harga hasil pertanian pada pasar sehingga tidak dipermainkan oleh

.....

### 3. Pembangunan Pertanian

Pembangunan adalah merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana serta sistem baru. Sistem itulah yang kemudian akan memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat<sup>14</sup>. Kerap kali ketimpangan pembagian hasil pembangunan tidak merata dan cenderung eksploitatif dan banyak masyarakat yang tidak menikmatinya. Dari proses inilah kita akan menjumpai kesenjangan pada proses penerimaan hasil dari upaya memajukan peradaban<sup>15</sup>.

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pertanian di Indonesia:

- a. Potensi sumberdaya yang besar dan beragam,
- b. Pangsa sektor pertanian ini terhadap pendapatan Nasional cukup besar,
- c. Besarnya pangsa terhadap ekspor pertanian Nasional,
- d. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,
- e. Peranan sektor pertanian dalam penyediaan pangan masyarakat cukup signifikan, dan
- f. Menjadi basis pertumbuhan perekonomian di pedesaan.

Potensi pertanian yang besar namun sampai saat ini sebagian besar dari petani banyak yang termasuk dari golongan miskin. Hal ini

---

<sup>14</sup> Nasikun. J, *Mencari Suatu Strategi pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda* Masalah Agro Ekonomika PERHEPI, NO.22, Th XIV, Hal 81-89, 1983.

mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian secara keseluruhan.

#### **4. Peran Dinas Pertanian dalam Mengembangkan Sektor Pertanian**

Sektor Pertanian sebagai salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam menentukan stabilitas, ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Wonogiri. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani.

Peran dan fungsi dinas yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Wonogiri No.3 tahun 2001 tentang susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Wonogiri yang meliputi urusan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan bimas ketahanan pangan. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pertanian Kabupaten wonogiri mempunyai program-program/arah kebijakan pembangunan bidang pertanian diantaranya:

##### **a. Bidang tanaman Pangan**

- 1) Peningkatan produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan
- 2) Pendayagunaan lahan secara optimal dengan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.
- 3) Peningkatan SDM petani.

##### **b. Bidang perkebunan**

- 1) Peningkatan produktivitas dan produksi Tanaman Perkebunan.
- 2) Peningkatan efisiensi usaha tani perkebunan.
- 3) Peningkatan SDM petani.

c. Bidang Bimas Ketahanan Paangan.

- 1) Pemantapan Ketersediaan Pangan.
- 2) Pendistribusian Pangan.
- 3) Pola Pangan Harapan.
- 4) Pengembangan agribisnis dan agroindustri
- 5) Peningkatan SDM.

d. Bidang Penyuluhan Pertanian

- 1) Peningkatan Kualitas penyuluhan pertanian
- 2) Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian
- 3) Penguatan kelembagaan tani.
- 4) Merubah pengetahuan sikap dan ketarampilan petani dari orientasi produksi ke pendapatan<sup>16</sup>.

**D. Definisi Konsepsional**

Merupakan unsur penelitian yang penting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial. Konsep ini diperoleh dengan melakukan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang sama<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, "Rencana Strategik (Renstra)" Tahun 2002-2005.



Adapun definisi Konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Peran

Peran adalah adanya keterlibatan Individu atau kelompok yang mempunyai tugas atau fungsi tertentu yang diakui keberadaannya dalam suatu masyarakat.

b. Dinas Pertanian

Dinas pertanian Kabupaten Wonogiri adalah unsur perangkat Daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah dibidang Tanaman Pangan, ketahanan pangan dan perkerbunan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

c. Pembangunan Pertanian

Pembangunan Pertanian adalah kegiatan berkesinambung untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya sektor pertanian yang mengarah pada Peningkatan pendapatan petani guna kesejahteraan masyarakat petani.

4. Peran Dinas pertanian

a. Peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan

- 1) Penangkaran benih bermutu.
- 2) Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu tanaman).
- 3) Perbaikan Irigasi dan Penambahan pompa air.



## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Ada pun definisi operasional ini di maksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan. Definisi operasional mengubah konsep-konsep dengan suatu pengukuran menggunakan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala-gejala yang dapat diuji atau diamati<sup>18</sup>.

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, indikator-indikator kegiatan yang digunakan adalah ;

1. Peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan.
2. Peningkatan produktivitas dan produksi tanaman perkebunan.
3. Pengembangan agribisnis dan agroindustri.
4. Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian<sup>19</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ex post facto* karena penelitian ini hanya mengungkap fakta saja tanpa adanya manipulasi variabel atau menciptakan kondisi tertentu. Dilihat dari sifatnya penelitian dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, karena hanya mencari fakta dan selanjutnya menjelaskan secara deskriptif tentang fakta yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, "*sosiologi Suatu pengantar*", Rajawali press, Jakar, 1987. Hal. 220.

<sup>19</sup> Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, "Rencana Strategik (Renstra)" Tahun 2002-2005.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, "*sosiologi Suatu pengantar*", Rajawali press, Jakarta, 1987. Hal. 107.

## 2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri dengan kebijakan-kebijakannya menyangkut pembangunan sektor pertanian dan usaha meningkatkan pendapatan petani.

## 3. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi dua unsur yaitu: a). Data primer dan b). Data sekunder.

### a. Data primer

Semua informasi mengenai konsep penelitian ataupun yang terkait dengannya yang diperoleh secara langsung dari unit yang dianalisa yang dijadikan sebagai objek penelitian.

### b. Data sekunder

Semua informasi yang kita peroleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencata keadaan kensep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Berisi informasi mengenai monografi dan penelitian. Data ini berguna untuk memberikan gambaran latar belakang penelitian. Gambaran latar belakang atau *setting* penelitian ini mempunyai fungsi sebagai rekomendasi bagi penelitian lebih

memberikan indikasi tentang karakteristik sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>21</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Interview atau Wawancara**

Interview adalah Teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul peran Dinas Pertanian dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri. Peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan kepada pegawai-pegawai yang ada di kantor Dinas pertanian Kabupaten Wonogiri dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian, misalnya otobiografi, surat-surat pribadi, buku harian, surat kabar, majalah, kajian-kajian pertanian, makalah-makalah seminar tentang pertanian dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, catatan-catatan monografi dan catatan-catatan lain yang sejenis yang terdapat di Dinas pertanian Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>21</sup> ... ..

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>22</sup>. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dimana pengertian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi dengan menginterpretasikan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Beberapa kriteria untuk menjelaskan tentang keberhasilan penulis lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain juga lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri memahami sesuatu masalah yang diteliti dalam hal tersebut sangat membutuhkan uraian yakni :

- a. Menjelaskan data operasional.
- b. Menyusun secara sistematis serta mengelompokkan setiap data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Menyatakan obyek dari data yang diamati secara transparan dan akurat.

Menurut Koentjaraningrat teknik analisa data kualitatif adalah :

*"Data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monograafis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit"*<sup>23</sup>.

Kegunaan metode kualitatif adalah lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

<sup>22</sup> Soekanto. S, *Teori Perubahan Sosial*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta. 1979. Hal. 22.